



## **BAB V**

# **RENCANA TINDAK LANJUT**

### **5.1 Permasalahan**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan periode 2008 -2013, berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang harus diperhatikan lima tahun ke depan meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **5.1.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

##### **A. Peningkatan IPM**

Persoalan utama yang dihadapi Kabupaten Klungkung adalah upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur dengan beberapa indikator seperti derajat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Secara regional IPM Kabupaten klungkung tahun 2011 menempati urutan ke depalan di Provinsi Bali. Dengan keterbatasan berbagai sumber daya yang dimiliki serta dengan wilayah yang relatif luas dengan sebaran yang terpisah menjadikan pembangunan wilayah Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain di Bali. Pemerataan pembangunan antara wilayah Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida merupakan sangat penting diperhatikan agar tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi antara wilayah Klungkung daratan dengan Kepulauan Nusa Penida perlu segera dilakukan melalui kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah secara terintegrasi antara pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, industri kecil, menengah, koperasi serta sektor ekonomi penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan



ekonomi. Ekonomi kerakyatan mengandung pengertian: (1) mewujudkan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 1), (2) berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, (3) mewujudkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara (pasal 33 ayat 2), dan (4) amanat pasal 27 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul yang sinergi antar-sektor pertanian, pariwisata, kelautan, industri kecil dan kekuatan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder atau tersier (industri dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan kejenuhan input. Upaya pembangunan ekonomi kerakyatan lebih difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan guna menjamin ketahanan pangan di tengah-tengah semakin tingginya alih fungsi lahan. Peningkatan ketahanan pangan harus terus didorong untuk mampu menggerakkan perekonomian daerah. Ketahanan Pangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional karena dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan juga mempengaruhi pembangunan sektor lain.

Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan ketersediaan input produksi (benih/bibit, pupuk, irigasi, pakan, obat-obatan, lahan, alat dan mesin) dengan kualitas yang baik dan jumlah yang memadai serta tersedia setiap saat dibutuhkan serta kebijakan subsidi input yang lebih efisien; (2) Meningkatkan dukungan penelitian, IPTEK dan penyuluhan; (3) Meningkatkan efektifitas pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta pengembangan sistem perkarantina, (4) Mendorong investasi di sektor pertanian yang berbasis produk lokal; (5) Mencegah atau mengurangi alih fungsi lahan pertanian



ke non pertanian dan melakukan konservasi sumber daya lahan dan air; (6) Memperluas areal lahan pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah dan lahan terlantar; (7) Melakukan penataan dan harmonisasi peraturan perundangan lahan untuk menjamin kepastian hukum lahan pertanian; (8) Mengembangkan infrastruktur pertanian; dan, (9) Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian.

Demikian juga sektor industri pengolahan yang semakin ketat persaingan antar produk dengan adanya era pasar bebas dan gencarnya serbuan produk-produk kerajinan luar Bali yang mulai masuk ke Bali. Pengembangan kegiatan ekonomi utama di setiap daerah dapat berjalan secara optimal sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing untuk itu maka dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang baik di daerah sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing daerah. Peran Pemerintah Daerah khususnya dalam perbaikan iklim investasi dan iklim usaha adalah pemberian kemudahan iklim investasi dengan menyediakan informasi investasi yang tepat dan menyediakan sumber tenaga kerja yang memadai.

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Klungkung diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru sesuai dengan lima zona kawasan ekonomi Kabupaten Klungkung. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya (*One Village One Product*). Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Klungkung antarwilayah dan antarsektor. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut akan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.

Isu strategis dalam kerangka memperkuat percepatan pemerataan ekonomi sebagaimana dimuat dalam MP3EI adalah memperkuat struktur ekonomi Indonesia saat yang ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara antar-kawasan. Hal ini tidak bisa



dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat. Namun begitu, upaya tersebut harus dimulai melalui upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata. Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya. Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

## **B. Pemerataan Pembangunan Daerah**

Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Klungkung. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubsidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat.



Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Untuk itulah pembangunan ekonomi Kabupaten Klungkung sesuai dengan prinsip pemerataan antarwilayah di Kabupaten Klungkung antar-wilayah dan antar-sektor dengan mempertimbangkan zone wilayah pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Klungkung sebagai strategi yang terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

### **5.1.2 Peningkatan Pelayanan Publik**

#### **A. Percepatan Reformasi Pemerintahan**

Isu strategis ini mencakup isu perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan perilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produktif, *entrepreneurship* dan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik.

Salah satu reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik, dimana pemerintah mempunyai wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

#### **B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan**

Berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah bersama pemerintah daerah, namun disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan



pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Sampai dengan tahun 2012 pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 103,29, APK untuk SMP/MTs sebesar 88,64 dan APK untuk SMA 103,49 sedangkan APK untuk Perguruan Tinggi baru mencapai 13,85. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM): SD/MI sebesar 92,82, SMP/MTs sebesar 67,88, SMA sebesar 70,00 dan Perguruan Tinggi sebesar 5,69. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : SD/MI sebesar 99,13 SMP/MTs sebesar 97,21 SMA/MA sebesar 75,07 dan Perguruan Tinggi sebesar 8,10.

Pencapaian angka seperti di atas masih perlu ditingkatkan terutama APK untuk SMP dan SMA guna mencapai wajar 12 tahun. Demikian juga APK untuk perguruan tinggi baru mencapai 13,85, ini menunjukkan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah.

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan tinggi antara lain adalah tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sehingga sebagian besar masyarakat, terlebih masyarakat miskin, tidak dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Tidak mengherankan jika kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan miskin menjadi sangat lebar. Keberadaan perguruan tinggi juga masih terkonsentrasi di wilayah Denpasar dan Badung sehingga akses masyarakat pada jenjang pendidikan juga menjadi lebih terbatas. Tantangan kedepan yang dihadapi kabupaten Klungkung adalah penyediaan layanan pendidikan yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain minat baca masyarakat juga masih rendah yang antara lain disebabkan oleh ketersediaan sumber bacaan yang masih terbatas. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat juga masih sangat sedikit dan belum sampai ke wilayah-wilayah perdesaan. Peran perpustakaan juga belum optimal yang antara lain disebabkan oleh koleksi bacaan yang sedikit, kurang beragam, dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat, serta kualitas tenaga pengelola yang belum baik.

Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal



jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan persebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai.

Berdasarkan atas hal tersebut, tantangan pelayanan pendidikan di kabupaten Klungkung adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu/miskin, peningkatan pendidikan keterampilan/pendidikan non formal bagi pemuda/putus sekolah, peningkatan pendidikan usia dini dan penuntasan wajar 12 tahun.

### **C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bidang kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan

hidup (UHH) Kabupaten Klungkung dalam satu dekade cenderung meningkat secara signifikan. Umur Harapan Hidup terus meningkat dari 68,95 pada tahun 2007 menjadi 69,07 pada tahun 2010 dan 69,10 pada tahun 2011. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat, namun UHH ini masih lebih rendah dari Kabupaten Gianyar dan Bangli. Beberapa indikator capaian di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1  
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Klungkung 2008 -2012

No	Indikator	Target (%)	Realisasi(%)				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Kunjungan Ibu Hamil	95	94,9	92,5	88,1	91,1	95,2
2	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani	80	54	65,1	55,6	79,9	87,7
3	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	90	92,23	92,4	89,9	92,5	96,4
4	Cakupan pelayanan ibu nifas	90	89,9	90,9	86,9	93,8	96,6
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	80	100	100	53,3	64,2	62,9
6	Cakupan kunjungan bayi	90	105,8	106,7	109,62	103,2	105,6
7	Cakupan pemberian MP-ASI bayi BGM Gakin	100	100	13,7	0	0	0
8	Cakupan UCI Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan anak balita	90	99,6	75,4	73,3	99,8	84,8
10	Cakupan gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat	100	23,1	16,5	46,5	90,8	100
12	Cakupan peserta KB	70	86,8	87,9	85	85,9	81,7
13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit	-	-	-	-	-	-
a	Penyakit TBC	70	-	-	52,7	77,8	58,5
b	Penyakit Diare	100	-	-	44,7	95,7	68,9
c	Penyakit Pnemonia Balita	86	-	-	4,7	4,3	34,3
d	Surveilans Epidemiologi AFP	100	-	-	4,8	7	4,7





No	Indikator	Target (%)	Realisasi(%)				
			2008	2009	2010	2011	2012
e	Penyakit DBD/100.000	100	-	-	276,2	87	26,9
14	Pelayanan kesehatan dasar maskin	100	43,6	49,2	61,9	28,8	56,4
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	100	4,2	4,3	4	3,2	4,2
16	Cakupan pelayanan GARDU level 1 di SARKES	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan desa/kelurahan KLB dengan penyidikan epid < 24 jam	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan desa siaga aktif	80	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kab.Klungkung 2012

### 5.1.3 Peningkatan Daya Saing Daerah

#### A. Peningkatan Produktivitas Daerah

Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Klungkung adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan serta menyusul sektor Bangunan. Pengembangan sector perekonomian Kabupaten Klungkung sangat dipengaruhi oleh aspek geografis secara keruangan, lingkungan maupun kewilayahan. Kabupaten Klungkung satu-satunya mempunyai wilayah kepulauan (Nusa Penida) di Bali dimana Kepulauan Nusa Penida yang terdiri dari Nusa Gede, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan memiliki sumber daya laut yang kaya akan biota laut seperti halnya terumbu karang, jenis ikan langka (ikan Mola-mola) dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Nusa Penida merupakan bagian dari kawasan segitiga karang dunia (Coral Triangle). Nusa Penida termasuk wilayah kecamatan di kabupaten Klungkung dengan luas total + 20.000 Ha, terdiri dari 3 (tiga) pulau kecil yaitu Pulau Nusa Penida, (Nusa gede), Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang memiliki ekosistem pesisir dan laut yang cukup lengkap seperti terumbu karang (1.419 Ha), Hutan Mangrove (230 Ha) dan Padang Lamun (108 Ha, TNC 2009)). Ketiga pulau kecil itu memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar, semua pantai ditiga pulau tersebut berpasir putih yang sangat disukai oleh para wisatawan, disamping potensi lainnya seperti : terdapat 20 lokasi penyelaman, 562 jenis ikan 5 jenis diantaranya ikan baru ( belum diberi nama) yang



hanya ada di Nusa Penida, 217 Ha terumbu karang, yang masih sehat, terbaik dan terluas di Bali, 308 Ha Padang lamun, dari 562 jenis ikan tersebut diantaranya ada spesies ikan mola-mola (Oceanic sunfish) disebut hewan laut unik dan langka karena hewan ini berada /hidup dikedalaman hampir 200 m dan baru akan muncul ke permukaan laut untuk mencari sinar matahari dan sekaligus untuk membersihkan badannya/kulitnya dari berbagai bakteri ataupun lumut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan mola-mola ini kemunculannya sudah dapat dipastikan dari bulan Juli hingga September, peristiwa aneh, unik dan langka inilah satu-satunya yang ada di dunia karena kemunculannya di laut dangkal di perairan Nusa Penida untuk berjemur yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dunia. Selanjutnya ada ikan pari manta ( Manta ray),Penyu (Sea turtle) Hiu (Shark), Lumba-lumba dan paus (Ceta Cean) dan Ikan Duyung/Dugong.

Berbagai sumber daya alam yang tersedia seperti sumberdaya alam,sumberdaya manusia dan sumberdayalainnya, mengharuskan upaya pemanfaatansumberdaya dilakukan melalui perencanaan yang tepat. Salah satunya adalah mengembangkan sektor/komoditas unggulan melalui pendekatan pengembangan produk local yang memiliki nilai komparatif maupun kompetitif berbasis OVOP. Pendekatan ini dititikberatkan pada pengembangan sektor/komoditas unggulan berbasis OVOP dapat pengembangan satu atau dua sektor/komoditas unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan produk lainnya. Pengembangan produk unggulan berbasis OVOP ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang pada akhirnya meningkatkan skala ekonomi (*economic of scale*) industri yang bersangkutan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dari industri/daerah tersebut di pasar global serta efisiensi penggunaan sumberdaya lokal yang tersedia. Beberapa komoditas unggulan yang sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Klungkung seperti sapi bali, rumput laut, produk kerajinan barang seni dan lainnya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah,

## **B. Peningkatan Infrastruktur Wilayah**

Akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksudkan pembangunan infrastuktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang sarana dan



prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar-wilayah. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antarkelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya dengan sasaran: (1) mensinergikan pembangunan antar- sektor dan antar-wilayah sesuai potensi dan daya dukung lingkungan; dan (2) meningkatkan infrastruktur sesuai arah pengembangan yang menjangkau seluruh wilayah.

### **C. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Peningkatan sumber daya sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk menjawab berbagai tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah. Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan,



sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, "Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil".

Pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas memerlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan komprehensif, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Usaha peningkatan sumber daya aparatur di Kabupaten Klungkung telah dilakukan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

#### **D. Pelestarian Lingkungan**

Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. *Over lapping* dupkisasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Disamping itu, ke depan pembangunan Klungkung harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan.

Klungkung ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia dimanapun. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan ke depan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana* dan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha



untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

## **E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Permasalahan utama dalam penyediaan anggaran pembangunandaedrah Kabupaten Klungkung adalah masih rendahnya persentase PAD terdapat pendapatan daerah. Sejalan dengan pemberlakuan kebijaksanaan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klungkung berbagai kebijakan perlu dikembangkan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:

### **a. Perbaikan Manajemen**

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi PAD menjadi pendapatan daerah dengan mengacu pada peraturanan perundangan yang berlaku, serta mampu menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

### **b. Peningkatan Investasi**

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban.



### c. **Optimalisasi Aset Daerah**

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan/mengoptimalkan penggunaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Pengelolaan barang daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **5.2 Tantangan**

### **A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode 2008 -2013, dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang kehidupan sosial dasar dan sosial budaya 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam 20 tahun mendatang jumlah penduduk Kabupaten Klungkung semakin besar. Kondisi saat ini dengan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan merupakan tantangan tersendiri terlebih kecenderungan perpindahan masyarakat dari Desa ke Kota untuk mengadu perbaikan nasib. Oleh karenanya pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dalam rangka mendukung pembentukan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif dan pemertaan sumber daya dan hasil pembangunan.
2. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali yang akhirnya akan merambah ke Kabupaten/Kota di Bali termasuk Kabupaten Klungkung. Semakin meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua seiring perubahan pola makan dan jenis penyakit yang diderita. Tantangan dalam hal kualitas



penduduk adalah masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahkan masih lebih rendah dari Negara tetangga di ASEAN. Hal tersebut disebabkan faktor kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah. Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan kepada aparat desa setempat untuk dilanjutkan ke dinas teknis terkait (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data.

Tantangan lain dari segi SDM sebagai bentuk pelaksanaan darma agama (ajaran agama), ahlak dan moralitas masyarakat serta kerukunan hidup (Paras Paros Selulung Sebayantaka) mengalami degradasi sehingga menjadi kendala dalam pengembangan kualitas penduduk.

3. Angka pengangguran dan setengah pengangguran masih relatif tinggi, tenaga kerja yang memiliki ketrampilan/skill masih kurang dalam jumlah karena belum adanya balai pelatihan kerja di Kabupaten Klungkung.
4. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi serta masih tingginya angka balita yang mengalami gizi kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida, Lembongan, Jungut Batu dan Ceningan. Belum optimalnya penanganan penyakit menular (DBD, Rabies, TB Paru, Malaria, Diare, Flu Burung dan penyakit menular lainnya). Kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan masih kurang. Sistem Informasi Kesehatan belum memadai. Belum maksimalnya tingkat utilitas RSUD Klungkung. Belum terpenuhinya nomenklatur kebutuhan Dokter Spesialis dan tenaga paramedik serta belum memadainya bangunan gedung RSUD berikut peralatan kesehatan



masih perlu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. Manajemen menuju entrepreneurship belum maksimal. Masih tingginya IMR dan MMR. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat. Masih rendahnya kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat seperti obesitas, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan. Masalah lain yang akan mengalami kondisi yang sama adalah kesakitan dan kematian akibat lemahnya penanganan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Tantangan ini akan semakin berat dipengaruhi semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk, oleh karenanya penyakit menahun (kronis) akan semakin dominan yang memerlukan masa perawatan lebih panjang dengan biaya pengobatan lebih tinggi membebani masyarakat.

5. Kualitas SDM berpengaruh terhadap daya saing di-era global ini. Secara umum kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Klungkung masih rendah. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja. Demikian halnya kualitas pendidikan formal yang tercermin dari rendahnya APM/APK pada berbagai jenjang pendidikan khususnya jenjang SLTA, rendahnya angka melanjutkan siswa lulusan SMA ke perguruan tinggi, dan masih kurangnya jumlah sekolah kejuruan. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai standar yang berlaku, guru yang ada masih kurang termotivasi untuk mengajar sebagai akibat dari masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Diparuh lain, angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan luar sekolah (PLS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah serta kemampuan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai.





6. Selain tingkat pendidikan, kurangnya daya saing penduduk Kabupaten Klungkung disebabkan pula karena kurangnya jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*). Selanjutnya faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya arus migrasi dan meningkatnya penjualan lahan-lahan pertanian kepada para pihak yang berasal dari luar Bali. Bila tidak segera didapatkan solusinya maka dalam 20 tahun kedepan tidak keliru dikatakan bahwa penduduk Klungkung dan Bali pada umumnya hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri akan menjadi kenyataan.
7. Dalam 20 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda.
8. Intensitas pembinaan kesatuan bangsa, organisasi politik, profesi, keagamaan dan LSM, kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat (termasuk gender) masih relatif rendah terutama dikaitkan dengan keterbatasan kemampuan daerah dalam memberikan bantuan keuangan untuk operasional kelembagaan dan kuantitas jangkauan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan termasuk kemiskinan.
9. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal.
10. Dibidang kehidupan beragama, timbulnya banyak aliran-aliran keagamaan/kepercayaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya disintegrasi dalam kehidupan beragama, sehingga tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan pengamalan ajaran



agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan kehidupan antar dan intra umat beragama di Kabupaten Klungkung dan Bali pada umumnya, namun upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum optimal hasilnya di masyarakat. Dalam kehidupan darma agama tantangan yang sering muncul adalah fanatisme sempit, berperilaku amoral, dan kekerasan anarki di masyarakat.

11. Pelaksanaan Sistem Promosi Pariwisata baik secara kualitas dan kuantitasnya masih belum memadai. Hal tersebut tercermin dari relatif masih kurangnya cakupan luasan promosi pariwisata melalui Media Cetak, Elektronika dan Event-event Pariwisata, kurang optimalnya perolehan retribusi disektor pariwisata, masih banyaknya obyek pariwisata yang belum berkembang, masih adanya usaha Jasa Perjalanan dan Pramuwisata di Kabupaten Klungkung yang belum memiliki ijin, masih banyaknya Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang belum memiliki ijin, belum optimalnya sarana prasarana untuk menjaga keamanan Museum Semarajaya (pemasangan alat kamera monitor, alarm untuk memberikan peringatan dini terhadap pencurian), belum optimalnya pemahaman prajuru/krama dalam menyikapi Awig-Awig yang tersurat, beragamnya Desa Pekraman sesuai dengan keadaan Desa Kala dan Patra, belum optimalnya nilai-nilai ajaran agama Hindu untuk dipahami secara satu kesatuan yang utuh sesuai dengan sastra yang tersurat, beragamnya tingkat pemahaman umat akan ajaran Agama Hindu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian Klasik, kurangnya even-even yang bersifat memotivasi, dan masih rendahnya perhatian/penghargaan terhadap para seniman.

## **B. Ekonomi**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode 2008 -2013, dan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Struktur perkonomian Kabupaten Klungkung yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder, dan tersier pada periode 2008-2027 kontribusinya



terhadap PDRB Kabupaten Klungkung diperkirakan akan terjadi perubahan yang lambat namun tidak signifikan kecuali sektor primer dan sektor sekunder diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi seiring dengan upaya untuk lebih menyeimbangkan perkembangan pembangunan antar sektor-sektor unggulan daerah seperti antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan industri kecil. Struktur ekonomi Kabupaten Klungkung masih tetap didominasi oleh peranan sektor tersier yang pada tahun 2008 mencapai 44,4% dan sektor primer sebesar 37,2% dan sektor sekunder 18,37%. Sementara pada periode 2008-2025 diharapkan capaian kontribusi sektor primer dan sekunder dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung atas harga konstan adalah masing-masing 20%, 25%, dan 55%.

2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam periode 2008-2025 diharapkan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka pertumbuhan yang optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Klungkung sampai dengan keadaan terakhir 2008, dan dengan asumsi kondisi perekonomian Kabupaten Klungkung periode 2008-2025 tidak akan mengalami gejolak yang signifikan baik terkait aspek politik, keamanan, kebijakan ekonomi nasional, isu tersebarnya wabah penyakit maka dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung diperkirakan mencapai di atas 7%. Laju pertumbuhan ekonomi ini, diharapkan didukung sebagian besar oleh pertumbuhan disektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa.
3. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan justru terjadi pada lahan-lahan sawah subur. Dalam kurun waktu 10 tahun, rerata mencapai 16,2 ha/tahun), mengecilnya debit air untuk irigasi, karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan adanya gangguan sumber air di hulu. Beberapa subak pengairannya sangat tergantung pada subak lain di luar wilayah Kabupaten, anomali iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dalam tahun-



tahun terakhir ini, kondisi iklim semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya, kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dengan rerata Luas pemilikan lahan di Kabupaten Klungkung nisbi kecil ( $\pm 0.30$  ha), dengan sifat produksi tanaman pertanian yang bersifat musiman (ada masa panen raya dan ada masa peceklik) maka keadaan ini mempengaruhi fluktuasi harga di pasaran, penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal meskipun teknologi yang dihasilkan oleh Litbang, pemerintah dan swasta telah tersedia, kelembagaan belum mantap termasuk kuantitas dan kualitas petugas dan petani yang bergerak di sector pertanian dan perkebunan belum optimal, dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama: "benih/ bibit bermutu" belum memenuhi prinsip "5 tepat" (tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). Demikian juga halnya masalah alat mesin Pertanian (Alsintan) masih terbatas, dan adanya kerusakan jaringan irigasi, kurangnya jalan usaha tani, terbatasnya embung/cubang di lahan kering serta masih kurangnya Balai pertemuan/Balai yang representative untuk mewadahi aktivitas petani di tingkat Subak.

4. Tantangan 5 tahun kedepan lainnya yang berkaitan dengan pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya disisi lain, karena menurunnya fungsi hidro-orologis, dan terjadinya persaingan antara penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor.
5. Menurunnya populasi sapi akibat penjualan untuk keperluan sekolah anak, utamanya sapi-sapi yang masih produktif, terbatasnya ketersediaan pakan Hijauan Makanan Ternak (HMT), fluktuasi harga pakan tidak stabil



mempengaruhi terhadap animo masyarakat untuk memelihara babi, adanya penyakit flu burung (AI), SDM peternakan yang masih perlu ditingkatkan, waktu melaut pendek karena sarana yang dimiliki oleh nelayan relatif sederhana, kurangnya animo masyarakat budidaya ikan darat, dan terbatasnya air untuk perikanan darat, karena alih fungsi lahan dengan debit tertentu. Beberapa faktor yang menjadi ancaman/hambatan terkait dengan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Klungkung antara lain : (1) Dijualnya ternak yang masih produktif oleh peternak, Karena keadaan ekonomi; (2) Keterbatasan tersedian HMT sepanjang tahun; (3) Khusus di Nusa Penida terjadi penurunan performance genetika sapi; (4). Harga pakan yang tidak stabil mempengaruhi biaya pemeliharaan sehingga populasi babi menjadi tidak stabil; (5) Berjangkitnya penyakit sonosis dan endemis; (6) Penangkapan ikan dilakukan secara overfishing, destructive fishing; (7) Fluktuasi harga yang sangat tajam; (8) Kerusakan ekosistem terumbu karang.

6. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam kegiatan usaha industri kecil kerajinan dan masih sederhanya pemanfaatan teknologi industri yang digunakan serta masih minimnya penguasaan Iptek produksi maupun pemasaran oleh pengerajin. Bahan baku dan bahan penolong masih sebagian besar tergantung dari pihak luar, permodalan berikut sarana dan prasarana yang dimiliki relatif masih belum memadai, design dan mutu produk yang dihasilkan belum mampu bersaing ditandai dengan produk barang hasil local dan komoditas pangan termasuk Sembako masih rendah dalam kualitas dan kuantitasnya. Intensitas promosi ditingkat daerah, regional, maupun Internasional dirasakan masih kurang, demikian halnya kerja sama dengan BPEN, sosialisasi tentang perlindungan konsumen, tenaga teknis dibidang perlindungan konsumen, dan jangkauan pengujian Laboratorium. Tingginya tingkat fluktuasi kondisi perekonomian dan ketatnya persaingan usaha. Kurangnya kesadaran pengusaha industri dan perdagangan mentaati perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proyeksi ancaman bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Klungkung ke depan antara lain : (1) Adanya pasokan bahan baku dari luar tidak lancar; (2)



- Adanya persaingan mutu dan harga (anti dumping) produk industri dari luar; (3) Diterapkannya ketentuan SKA (Rules of Origin) oleh Negara tujuan yang ketat; (4) Era perdagangan bebas (NAFTA, AFTA, WTO); (5) Terjadinya wujudnya persaingan inter antar usaha perdagangan sangat ketat; (6) Fluktuasinya situasi perekonomian regional, nasional dan daerah; (7) Terjadinya persaingan tidak sehat; (8) Adanya permainan harga oleh supplier; (9) Pasokan distribusi minyak tanah oleh agen ke pangkalan tidak lancar; (10) Adanya penyalahgunaan rokok oleh sebagian kecil masyarakat pecandu minuman; (11) Kesadaran pemilik/pengusaha dagang masih rendah terkait tera ulang UTTP; (12) Penerapan sanksi hukum, ketentuan peraturan perizinan Industri dan perdagangan belum efektif.
7. Lemahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan, daya inovasi kreativitas dan profesionalisme di kalangan Koperasi dan UKM, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi serta keterbatasan kemampuan pemupukan permodalan Koperasi sebagai akibat kurangnya partisipasi anggota dan masih terbatasnya akses pada sumber-sumber permodalan, sehingga menjauhkan upaya kemandirian Koperasi dan UKM. Proyeksi ancaman pada bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain : (1) Rendahnya kualitas pelaku ekonomi; (2) Adanya krisis multidemensi yang berkepanjangan; (3) Terbatasnya alokasi dan pembangunan sector usaha kecil dan menengah oleh pemerintah; (4) Lemahnya konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan. Proyeksi permasalahan pada bidang Koperasi PK dan M antara lain : (1) Rendahnya kualitas SDM; (2) Iklim usaha yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan Koperasi PK dan M, belum tegaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan adil; (3); Terbatasnya akses Koperasi PK dan M terhadap bahan baku, sumber modal, teknologi informasi, pasar, lokasi usaha, serta jaringan kerja kemitraan dan rendahnya partisipasi anggota.
8. Rendahnya kinerja investasi penanaman modal di daerah disebabkan masih adanya beberapa permasalahan dan tantangan pokok yakni: (1) Birokrasi yang masih relatif panjang dalam prosedur perizinan. Di



Indonesia membutuhkan waktu rerata 151 hari dari 12 prosedur perizinan, sedangkan di RRC, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari. Demikian juga dengan kepastian hukum yang belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi yang tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat daerah dan antarsektor. Beberapa hambatan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Klungkung antara lain: (1) Citra Indonesia umumnya dan Bali khususnya sebagai Negara/daerah tujuan wisata, kurang memberikan rasa aman bagi wisatawan manca Negara, sehingga ada kesulitan bagi para calon investor untuk memproyeksikan pangsa pasar luar negeri; (2) Belum tertatanya dan atau tersedianya sarana dan prasarana sebagai akses menuju dan dari kawasan pariwisata dan Objek Wisata merupakan kendala disisi lain dalam upaya menarik investor; (3) Sistem birokrasi dalam kontek penyediaan factor-faktor insentif berupa pelayanan perijinan maupun factor insentif lainnya yang belum memadai merupakan hambatan paruh lain dari upaya penanaman modal di Kabupaten Klungkung.

9. Manajemen Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala(PDNKK) dan PDAM masih berorientasi manajemen birokrasi nirlaba dan tingkat pelayanan publik PDAM belum mencapai kepuasan pelanggan. Proyeksi ancaman bagi PDNKK antara lain (1) Lemahnya kemampuan manajemen sebagai suatu organisasi yang berorientasi laba (2) SDM PDNKK sebagian besar kurang memiliki interpreneurship (3) PDNKK memiliki perusahaan pesaing yang semakin banyak. Proyeksi ancaman bagi PDAM antara lain: (1) Citra pelayanan publik yang kurang memuaskan akan tetap berlanjut terutama dalam system kelancaran catu air ke sambungan rumah tangga apabila PDAM tidak mampu membenahi sistem yang terpasang saat ini; (2) Kebijakan tarif yang nisbi rendah di satu paruh, disertai kenaikan harga BBM untuk operasi PDAM system pompa di paruh lain merupakan ancaman bagi PDAM dalam rangka meraih laba secara proporsional.



### **C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode 2008 -2013, dan kondisi penerapan IPTEKDA di Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang penerapan IPTEKDA tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Persaingan perkembangan teknologi dalam era global akan semakin ketat yang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung berbagai bidang kehidupan menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga 20 tahun kedepan diharapkan kontribusi iptek dalam berbagai bidang kehidupan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Temuan-temuan baru dari hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh lembaga pendidikan maupun penelitian lainnya di Kabupaten Klungkung masih sangat terbatas. Paket teknologi dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dihasilkan dan diterapkan baik pada bidang industri maupun pertanian juga masih sangat terbatas, selain itu komitmen berbagai pihak dalam pengembangan iptek terutama dukungan pendanaan yang diperuntukkan guna pengembangan iptek masih sangat kurang memadai.

### **D. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode 2008 -2013, dan kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang peningkatan sarana dan prasarana tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang terkait langsung peningkatan produksi hasil pertanian (lahan sawah basah) masih belum optimal, terlebih lagi irigasi yang terletak di perbatasan kabupaten seperti antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Bangli masih banyak dijumpai jaringan irigasi yang rusak sebagai akibat kurang mampunya pemerintah daerah Kabupaten Klungkung memelihara jaringan yang ditetapkan. Kabupaten Klungkung dengan luas areal sawah basah (Klungkung darat/Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung,





Kecamatan Dawan). Luasnya 3.873 ha mempunyai jaringan irigasi dengan panjang 120.441 km, dengan tingkat jaringan yang berbeda;

- 3 (tiga) jaringan teknis sepanjang 895 km.
- 14 (empat belas) jaringan semi teknis 83.971,5 km
- 7 (tujuh) jaringan non teknis 2.874,4 km

Sumber air yang digunakan untuk bertani masih mengandalkan mata air yang ada di permukaan bumi dengan sungai yaitu sungai Melangit, sungai Jinah, sungai Bubuh, Sungai Tukad Unda.

Jumlah subak di Kabupaten Klungkung adalah 42 subak sawah, infrastruktur irigasi secara rutin setiap tahun perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. Alokasi anggaran untuk irigasi yang bersumber dari DAK maupun sumber lainnya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi saluran tersebut sehingga dapat senantiasa berfungsi baik dan mantap. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, petani pemakai air dan komisi irigasi (di Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung pada khususnya yang meletakkan subak sebagai lembaga sosial petani pemakai air peninggalan nenek moyang sejak turunnya Rsi Markandya dari Gunung Rawung ke Bali/Pura Luhur Besakih yang lebih dikenal dengan nama Subak Agung). Peraturan Pemerintah ini juga lebih menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. Tantangan 20 tahun kedepan adalah terjadinya penurunan bahkan sampai pada semakin terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat termasuk air permukaan dan air tanah termasuk kebutuhan non pertanian disamping terganggunya beberapa komponen siklus hidrologi seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan serta penanganan melalui konservasi.

2. Transportasi darat, fisik jalan yang ada di Kabupaten Klungkung sesuai Keputusan Gubernur nomor 199 tahun 2000 adalah sepanjang 342.460 km



terbagi di wilayah Klungkung Daratan sepanjang 197.260 km dan di wilayah Nusa Penida sepanjang 145.200 km. Kondisi fisik jalan di wilayah Nusa Penida (data Bina Marga tahun 2006) terbagi sebagai berikut: kondisi baik 29.590 km; kondisi sedang 21.910 km; dan kondisi rusak 93.700 km. Kondisi fisik jalan di wilayah Klungkung Daratan: kondisi baik 130.550 km; kondisi sedang 43.270 km; dan kondisi rusak 23.440 km.

Sebagai ilustrasi kondisi tersebut diatas adalah jalan lokal di wilayah Nusa Penida masih kurang memadai terutama di pusat kecamatan dan jalan-jalan yang menghubungkan antar dusun dengan dusun pada dua desa berdekatan/berbatasan pada umumnya belum diaspal (badan jalan dibangun dengan swadaya masyarakat) atau kondisi aspalnya sudah rusak berat, di wilayah Klungkung Daratan kondisi jalan pada umumnya sudah baik dan memadai. Dengan demikian tantangan 20 tahun kedepan adalah optimalisasi pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan baru dan jembatan sesuai kebutuhan dengan dukungan dana yang memadai (DAK, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten) setiap tahun anggaran.

Angkutan penumpang umum baik antar provinsi, antar kota/kabupaten dalam provinsi, maupun antar desa dalam kabupaten masih kurang tertib termasuk dalam pemanfaatan Terminal Semarapura. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dan prima. Sarana dan prasarana parkir belum lengkap dan memadai. Awak armada/sopir masih terus memerlukan pembinaan dalam berdisiplin, beretika, dan berbudaya sopan santun berlalu-lintas.

3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana lampu penerangan jalan umum masih perlu ditingkatkan dalam rangka pencegahan dan menekan terjadinya tindak kriminal disamping juga sebagai media memperindah kota/desa. Demikian halnya dengan pembangunan, penataan, dan pemeliharaan gedung dengan prasarannya sebagai tempat kerja untuk pelayanan publik/masyarakat luas berikut bangunan-bangunan tempat tinggal (rumah jabatan, rumah dinas), sarana mobilitas (kendaraan roda 4 dan roda 2), dan pengelolaan sarana sandi dan telekomunikasi dilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dewan serta sertifikasi atas aset tanah milik



pemerintah daerah masih memerlukan perhatian dan peningkatan lebih baik lagi.

4. Tantangan 5 tahun kedepan dalam hal transportasi laut adalah perwujudan pembangunan dermaga sandingan kawasan klungkung daratan eks galian Gol C Gunaksa yang berkelanjutan. Penataan pelabuhan rakyat (Tribuana, Banjar Bias, Kampung Kusamba, Mentigi, Batununggul, Toyapakeh, Kutampi Kaler dan Suana), didukung dengan peningkatan fasilitas pelabuhan. Sedangkan dalam hal transportasi udara adalah pengembangan/pembangunan sebuah lapangan terbang sejenis Helipad untuk mengantisipasi perkembangan wilayah kepulauan Nusa Penida sebagai tujuan kunjungan wisatawan.
5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM maupun non PDAM yang akan dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah pelayanan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen belum seluruhnya dapat dijangkau, terlebih di wilayah Nusa Penida, Lembongan, Jungutbatu, dan Ceningan. Terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Klungkung Daratan yang bersumber dari mata air Telaga Waga, air tanah, mata air Lumbes, dan di wilayah Nusa Penida yang bersumber dari mata air Guyangan, Penida (Sakti) dan lainnya termasuk pembangunan Estuaridam di Tukad Kaliunda (SARBAGITAKU) memerlukan anggaran yang tidak sangat besar. Kerjasama yang perlu dirintis antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) berdasarkan sistem pengelolaan yang disepakati merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan pemerataan sebaran kebutuhan air bersih/air minum.
6. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi 5 tahun mendatang adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga yang pada umumnya masih memanfaatkan got-got/saluran pada jalan-jalan umum dapat diwujudkan secara terpusat pada kawasan tertentu dengan jumlah penduduk padat serta kegiatan ekonomi tinggi melalui sistem perpipaan akan sangat memerlukan penyediaan anggaran dana yang sangat besar. Kendala lain adalah masih kurangnya pemahaman



masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat.

7. Pengelolaan persampahan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan dan kesulitan penyediaan lahan peruntukan lokasi TPA yang representatif yang tidak berdampak lain terhadap pencemaran lingkungan.
8. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kurun waktu 20 tahun kedepan masih perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhan perwujudannya. Sistem satu tower dengan beberapa operator pengguna merupakan alternatif penataan dan pengintegrasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghilangkan kesan 'Kabupaten Klungkung dengan seribu tower' (sudah berdiri 42 tower selular).
9. Dibidang Energi, tingkat pertumbuhan beban aliran listrik melalui sistem jaringan inter koneksi Jawa-Bali, Sanggaran, Pamaron dan Gilimanuk diprediksikan kebutuhan pemakaian listrik beban puncak berdasarkan informasi PT PLN menyatakan wilayah Bali pada umumnya akan mengalami kecenderungan krisis kelistrikan. PT PLN memandang perlu mewujudkan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui tenaga energi baru seperti pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang dalam hal ini telah sampai pada taraf penelitian AMDAL. Alternatif lain adalah pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. Kesemuanya tetap dalam tataran ramah lingkungan sebagai substitusi pengurangan pemakaian bahan bakar minyak. Di wilayah Nusa Penida khususnya Desa Sakti/Puncak Mundi telah dikembangkan sebagai desa wisata energi yang merupakan locus peninjauan dari para peserta KTT Global Warming baru-baru ini dan perlu mendapat perhatian berkelanjutan.

Tantangan lain yang diprediksikan adalah semakin pesatnya pertumbuhan industri pariwisata, masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, masih sangat terbatasnya potensi cadangan energi primer, dan masih lebih tingginya kenaikan konsumsi pemakaian listrik dibandingkan pasokan yang



disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penghematan pemakaian listrik.

### **E. Politik, Hukum dan Pemerintahan**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode tahun 2008 -2013, dan kondisi politik, hukum dan tata pemerintahan Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang peningkatan tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum mantapnya pemahaman masyarakat dan khususnya elit politik terhadap etika berpolitik yang santun sehingga perlu diupayakan terus pembelajaran dan peningkatan kapasitas melalui pembinaan etika politik dalam kerangka demokratisasi yang terus bergulir. Hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya persaingan tidak sehat, tidak menjunjung tinggi sportifitas, atau lebih mementingkan kepentingan pribadi/golongan dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah pembinaan dalam rangka pematapan pendidikan pra, saat, dan pasca Pemilu legislatif, Pilpres Pilgub, Pilbup bagi para elit politik maupun masyarakat.
2. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat sebagai akibat kurang selarasnya perkembangan produk hukum dengan perkembangan jaman, hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan perhatian besar dalam penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman.



3. Dibidang pemerintahan, bergulirnya reformasi dengan diantara tuntutanannya adalah pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah), maka pada tahun 1999 digulirkan Undang-undang nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam proses perjalanannya telah banyak mengalami perubahan-perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait seperti: UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku dengan diganti oleh UU nomor 32 dan nomor 33 tahun 2004, demikian pula PP nomor 8 tahun 2000 telah diganti dengan PP nomor 41 tahun 2007, dan lainnya sehingga menimbulkan kecenderungan sebagian aparat belum dapat memahami dan menghayati secara baik arti otonomi daerah yang sebenarnya. Sebagai bukti nyata adalah setiap kali pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres masih kerap terjadi tindakan anarkis dan bentrokan antar pendukung. Demikian pula dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan cenderung mendapati kesulitan dalam koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal-hal tersebut dapat dicegah antara lain dengan penyempurnaan peraturan perundangan yang diharapkan dapat menjaga keutuhan kesatuan daerah maupun nasional. Lebih lanjut dengan terbitnya PP nomor 41 tahun 2007 sebagai pengganti PP nomor 8 tahun 2001, dan PP nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti Perda nomor 1 tahun 2001 terkait dengan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan maka dalam penyusunan dan penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung diharapkan dapat memenuhi kesesuaian kebutuhan riil dan pelayanan prima pada masyarakat dengan tetap mengacu pada Hemat Struktur dan Kaya Fungsi.
4. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi.



## **F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode tahun 2008 -2013, dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang peningkatan keamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat guna menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pembangunan wilayah, tantangan yang dihadapi tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum disiplinnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Kemudian lebih lanjut tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung khususnya sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik.

## **G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan atas capaian kinerja pembangunan periode 2008 -2013, dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Klungkung, maka tantangan pembangunan di bidang tata ruang wilayah tahun 2013-2018 mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah dalam 20 tahun kedepan diarahkan pada pengembangan untuk mengakomodasikan sektor-sektor unggulan Kabupaten Klungkung dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan



- permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah.
2. Sesuai hasil studi Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005 yang dilaksanakan oleh PPLH Unud, ada beberapa issues/permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Klungkung adalah terjadinya pencemaran udara oleh debu dan terjadinya kebisingan di kawasan Perkotaan, berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai akibat adanya alih fungsi lahan, menurunnya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber air bersih, meluasnya abrasi pantai, meningkatnya volume /produksi sampah dan limbah, adanya pencemaran udara di beberapa tempat, bertambah luasnya lahan kritis, adanya kerusakan terumbu karang, rusaknya lahan pasca tambang Galian C, luas kawasan Hutan kurang dari 30%, beberapa jenis satwa nyaris punah dan atau keberadaannya langka.
  3. Tutupan vegetasi yang jarang dan budidaya pertanian tanaman pangan yang intensif pada kawasan konservasi dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatkan sementasi. Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya pemanfaatan lahan dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi tetapi kurang ramah lingkungan, disamping diperlukan penegakan peraturan pemanfaatan ruang secara tegas.
  4. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi harapan. Proyeksi hambatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan. Proyeksi masalah yang mungkin dihadapi di masa mendatang antara lain: (1) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat akar rumput yang perlu diakomodasi dalam





- perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas; (2) Adanya disparitas antara wilayah Klungkung daratan dengan kepulauan yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk mencapai equality dan equity.
5. Prediksi kondisi sumber daya alam dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional.
  6. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisinya dapat dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat yang tinggi bagi pemenuhan hidup masyarakat Kabupaten Klungkung.  
Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya.
  7. Tantangan 20 tahun kedepan dalam pengelolaan hutan adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah konservasi bersama masyarakat, dikaitkan dengan pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman.
  8. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan dalam 20 tahun kedepan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air



yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, reboisasi perlindungan dan pemanfaatan hutan, sumber daya air yang mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir.

Kebijakan pengendalian banjir dan pengendalian sedimen dengan melakukan tindakan pencegahan fisik dan non fisik, serta menetapkan wilayah target. Dengan demikian diharapkan kelangsungan sumber daya air di Kabupaten Klungkung tetap terjaga kelestariannya.

9. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Tantangan 20 tahun kedepan adalah rendahnya kesadaran masyarakat, Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu.

10. Sampai dengan saat sekarang belum ada kegiatan Penanaman modal di wilayah Kabupaten Klungkung. Tantangan 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan penyiapan dan penyediaan perangkat lemah berupa Perda Penanaman Modal, dan perangkat keras dalam bentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas berikut sarana dan prasarana termasuk promosi dan dukungan dana pemerintah.

### **5.3 Modal Dasar**

#### **A. Sosial dasar dan Sosial Budaya**

Adanya kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali Nomor 153 tahun 2003 tentang pelaksanaan Tertib Administrasi kependudukan, memberikan peluang dilaksanakannya tertib administrasi dan pelayanan kependudukan di masa datang.



1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menuju kepada tertib administrasi di wilayah Kabupaten Klungkung diperkirakan akan membantu keberhasilan penertiban, pelayanan kependudukan, catatan sipil dan ketenagakerjaan.
2. Selain itu penciptaan lapangan kerja baru dan ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja, bagi para calon transmigran untuk perbaikan tingkat kesejahteraan, merupakan proyeksi keberhasilan di masa datang yang mungkin dicapai.
3. Dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah, maka tiap-tiap Kabupaten akan berusaha memajukan daerahnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pusat-pusat pembangunan (pariwisata atau bisnis lainnya) maka jumlah penduduk mendatang akan meningkat dan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendapatan bruto, ini merupakan peluang untuk program kesehatan. Secara demografi akan terjadi transisi epidemiologi, dimana penduduk lansia akan semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Letak Rumah Sakit yang merupakan persimpangan pariwisata maupun jalur Bali-Lombok akan dimungkinkan terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Adanya transisi epidemiologi dan peningkatan kecelakaan merupakan peluang bagi Rumah Sakit untuk mengembangkan upaya traumatic centre dan geriatric centre sebagai sentra unggulan. Dengan makin meningkatnya tingkat kemampuan pelayanan rumah sakit maka dimungkinkan kasus-kasus yang masuk ke RSUP Sanglah tidak akan mencukupi syarat dari segi jumlah untuk pendidikan, oleh karena itu rumah sakit daerah mempunyai peluang sebagai sentra pendidikan yang sekaligus meningkatkan kemampuannya.
4. Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan dan besarnya perhatian stakeholder terhadap laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kemiskinan dan pengentasannya menuju (*Millenium Development Goals*) MDGs 2015.
5. Penerapan Wajib Belajar (Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun), alokasi dana pendidikan minimal 20% dari total APBN/APBD, rencana Wajib Belajar



(Wajar) 12 tahun, semakin ketatnya seleksi atas lulusan peserta didik dan wajib belajar, dan ketatnya kontrol sosial. Selain dari pada itu makin terbukanya jaringan informasi dan komunikasi dan adanya BOS/BKM dan tetap berlangsungnya GN-OTA semakin membuka lebar kesempatan peningkatan kualitas pendidikan.

6. Masih tersedianya potensi obyek-obyek wisata yang sangat menarik dan layak dijual kepada Wisatawan dan semakin berkembangnya Sanggar/Group Kesenian yang mendukung geliat pariwisata serta besarnya dukungan dari Lembaga Legislatif terhadap pentingnya promosi pariwisata dan sarana prasarana penunjang.
7. Dukungan regulasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dalam hal Perijinan dan Keputusan, Perda No. 3 tahun 2004 tentang Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum.
8. Semakin banyaknya penduduk pendatang yang masuk ke wilayah Kab. Klungkung tanpa dilengkapi dengan dokumen kependudukan, merupakan proyeknim permasalahan yang akan muncul di masa datang. Selain itu adanya Penduduk usia kerja bertambah yang menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah pula; serta adanya perbedaan harapan para transmigran dengan kenyataan setelah berada di daerah penempatan, juga merupakan permasalahan di masa datang dalam program transmigrasi.

## **B. Ekonomi**

1. Besarnya peluang permintaan bibit sapi Bali dari daerah-daerah lain, tingginya kebutuhan rumah makan dan upacara adat agama, kontinuitas kebutuhan ayam buras untuk upacara di Bali, dan masih adanya keinginan dari SDM peternakan untuk berlatih guna menambah wawasannya. Perkiraan keberhasilan di masa datang antara lain : (1) Ketersediaan bibit sapi secara kualitas dan kuantitas; (2) Ketersediaan sarana dan prasarana produksi secara stabil; (3) Dengan lebih memperhatikan kesehatan ternak diharapkan keberadaan populasi bisa dipertahankan (4) Keterampilan peternak semakin meningkat (5) Dengan adanya kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh kelompok nelayan saat ini diharapkan



- waktu melaut dan daya jangkau lebih panjang, sehingga mempengaruhi jumlah penangkapan; (6) Produksi meningkat dengan tetap menjaga kelestarian Sumberdaya ikan; (7) Meningkatkan potensi ikan air tawar.
2. Besarnya permintaan komoditas perikanan dari daerah lain, tingginya kebutuhan pemindangan, dan perubahan pola makan masyarakat dari daging ke ikan, serta memasyarakatkan masyarakat mengkonsumsi ikan guna memenuhi standar nasional.
  3. Kebijakan makro pemerintah dibidang Ekonomi berpihak kepada petani cukup besar dengan meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam hal antara lain: Revitalisasi pertanian yang dicanangkan 2005 oleh Presiden RI, kebijakan impor hasil-hasil pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah/beras, dan subsidi pupuk dan penyediaan kredit program. Potensi lain seperti kebutuhan hasil pertanian dan perkebunan cenderung terus meningkat untuk memenuhi pangan masyarakat dan bahan baku industri dan sumber daya lahan kering masih cukup luas dan belum tergarap secara optimal untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan serta masih cukup tersedianya teknologi pra dan pascapanen dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan kualitas hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Proyeksi keberhasilan di masa datang di bidang pertanian dan perkebunan didasarkan atas pertimbangan bahwa sumber daya agribisnis yang dimiliki Kabupaten Klungkung cukup memadai, luas dan beragam seperti sumber daya alam (air, lahan, keanekaragaman hayati-*biodiversity*), sumber daya manusia (tenaga, waktu, keahlian) dan sumber daya teknologi di bidang pertanian. Penangan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bijaksana akan mampu meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
  4. Terbukanya pasar global, nasional, regional dan daerah dan telah berjalannya kejasama antara PT. Ubersari dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan pengembangan pengerajin industri kecil, serta diupayakan terwujudnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah. Terwujudnya penguasaan dan penerapan teknologi menunjang usaha perdagangan berikut dukungan masyarakat Klungkung yang sadar



- akan penggunaan produk local dan semakin banyaknya keberadaan distributor barang produk komoditas pangan dan agroindustri. Proyeksi Keberhasilan bidang perindustrian dan perdagangan di masa datang antara lain :
- (1) Meningkatnya keterampilan dan manajemen serta mampu mengakses teknologi dan informasi pasar;
  - (2) Terwujudnya mutu produk industri kerajinan sesuai permintaan dan perkembangan pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
  - (3) Terwujudnya pasokan bahan baku dan bahan penolong yang lancar;
  - (4) Terwujudnya peningkatan pemasaran produk industri kerajinan
  - (5) Promosi secara berkala baik even daerah, regional, Nasional dan Internasional;
  - (6) Terwujudnya tertib usaha bagi pedagang dan produsen;
  - (7) Meningkatnya pengetahuan pada usaha perdagangan;
  - (8) Meningkatnya pengetahuan dan penerapan teknologi para pedagang dan pengusaha perdagangan
  - (8) Terwujudnya kelancaran penyaluran distribusi kebutuhan komoditas pangan (termasuk sembako, produk barang pertanian dan agroindustri);
  - (9) Terwujudnya penyerdahaan birokrasi industri dan perdagangan.
5. Tingginya pertumbuhan minat masyarakat dalam kepesertaan koperasi dan stabilnya pertumbuhan dunia usaha khususnya disektor industri kecil. Proyeksi keberhasilan pada bidang Koperasi PK dan M antara lain : (1) Kualitas tenaga kerja meningkat dan adanya diversifikasi usaha; (2) Kemampuan SDM yang ada di Koperasi PK dan M juga meningkat, dan (3) Menekan pengangguran dan berkembangnya kerjasama usaha.
  6. Tersedianya kawasan pariwisata di wilayah Nusa Penida, ODTW di Klungkung daratan, serta adanya potensi produk unggulan di bidang pertanian dalam arti luas semakin menarik minat para calon investor dalam negeri maupun luar negeri merupakan peluang upaya menarik investasi swasta di Kabupaten Klungkung. Adanya akses jalan Arteri Tohpati-Kusamba juga memberikan peluang bagi Kabupaten Klungkung sebagai daya tarik industri. Beberapa factor keberhasilan yang mungkin dapat diraih di masa datang sehubungan dengan upaya menarik penanam modal di Kabupaten Klungkung antara lain: (1) Terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata antara lain desa Sakti, Bunga Mekar, Suana dan desa Pejukutan; (2) Terwujudnya penanaman modal di sektor nonpariwisata



antara lain bidang penyediaan sumber air baku Bali Selatan, sarana rekreasi/ODTW dalam rangka alih fungsi eks galian C Gunaksa-Tangkas.

7. Proyeksi peluang dimasa depan bagi PDNKK antara lain: dapat berkolaborasi dengan kegiatan Pemda untuk meraih laba usaha, masih dimungkinkan PDNKK diversifikasi bidang usaha. Dan proyeksi peluang bagi PDAM lebih ditingkatkan dan apabila SARBAGITAKU telah terwujud adanya kolaborasi/kerjasama yang saling menguntungkan antara badan pengelola SARBAGITAKU dan PDNKK serta PDAM Klungkung dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Klungkung di masa datang karena PDAM merupakan perusahaan milik Pemerintah daerah yang bersifat monopoli karena pelayanan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak, serta masyarakat Semarapura tidak dimungkinkan menggunakan sumber air bawah tanah kecuali air PDAM. Proyeksi keberhasilan kedua Perusahaan Daerah di masa depan yakni bahwa apabila kedua perusahaan daerah ini direvitalisasi dalam semua aspek aktivitas bisnis, maka perusahaan daerah akan mampu berunjuk kerja sebagai perusahaan yang professional dengan sikap mental interpreneurship dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya di Kabupaten Klungkung.

### **C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Klungkung seharusnya mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal dasar yang diandalkan, seperti adanya aliran sungai Unda yang memiliki debit air cukup besar, adanya kawasan wisata di Nusa Penida, wilayah pantai dan laut yang luas, lahan pertanian yang masih subur, kawasan bekas galian C di Gunaksa, Tangkas, Jumpai, Sampalan Klod dan Gelgel yang bisa dimanfaatkan dengan sentuhan IPTEK. Lemahnya modal dan teknologi yang dimiliki merupakan salah satu penyebab dari rendahnya nilai tambah dari setiap sumber daya yang kita miliki, sehingga berakibat pada rentannya perekonomian.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka pengembangan IPTEK sebagai modal dasar peningkatan perekonomian daerah, secara jujur kita mengakui bahwa masih rendah dan bisa dikatakan hampir tidak ada. Hal ini juga sebagai akibat dari proses pendidikan mulai



dari tingkat dasar, menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi masih belum menekankan pada upaya penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita hanya terorientasi pada upaya untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sudah ada. Banyak perguruan tinggi di Bali dan Indonesia umumnya yang menghasilkan kaum intelektual, tetapi keberadaan orang-orang tersebut belum mampu menggairahkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arti mereka hanya bisa memanfaatkan yang sudah ada atau hanya sebagai user (pemakai). Kedepan diharapkan dengan adanya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki akan mampu dan mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sebagai upaya penciptaan karya baru dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Klungkung pada dasarnya tidak berbeda jauh dari daerah lain yang ada di Bali dan Indonesia umumnya. Jaringan internet sebagai sarana penunjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasa belum cukup signifikan dalam menunjang peningkatan IPTEK.

Fakta telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam belum memberikan nilai tambah yang wajar bagi daerah. Nilai tambah yang besar itu selama ini hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam dari daerah/negara yang memiliki keunggulan teknologi, manusia, dan menguasai pasar. Bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mencapai hal tersebut perlu langkah-langkah terobosan yang bervisi jauh kedepan, yang terukur dan menyeluruh berorientasi pada tujuan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

1. Di kota Semarapura baru tersedia satu buah terminal yang terletak di Galiran dan di Kecamatan Nusa Penida belum tersedia terminal sehingga masih ada peluang untuk dikembangkan. Tempat-tempat parkir yang telah ditetapkan: 21 tempat dengan jumlah luas areal : 318.462 m<sup>2</sup>, Jasa titipan: 2 unit usaha, Wartel: 19 unit usaha, Orari : 153 anggota, Rapi: 41 anggota, dan Kelompok Filateli sebanyak 7 kelompok. Tersedianya 11 titik penyebrangan sarana angkutan penyebrangan laut tradisional, Kapal boat





trayek Nusa Penida-Padang bay, Dermaga 1 unit, dan Restoran apung 2 unit serta jembatan gantung 1 unit.

2. Proyeksi peluang pada bidang Bina marga antara lain Pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk mempermudah akses ke seluruh kawasan pariwisata serta ke obyek daya tarik wisata, antar daerah produk dan pemasaran, dan pusat-pusat pertumbuhan yang padat lalu lintas. Pada bidang Cipta karya antara lain optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zone penyangga disekitar kota, serta meningkatkan peran dan fungsi penyangga kota agar dapat mandiri, dan revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik. Pada bidang Pengairan antara lain sistem prasarana pengairan diarahkan kepada upaya penyempurnaan peningkatan jaringan darah irigasi (subak) yang telah ada dan pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dengan melakukan transfer air dari daerah surplus air, pencegahan dan membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis untuk budidaya lainnya, dan masih banyaknya daerah irigasi dengan kondisi semi teknis dan non teknis, maka rencana pengembangan prasarana pengairan secara umum adalah penyempurnaan dan peningkatan daerah irigasi yang ada. Memantapkan penyediaan air irigasi dengan direncanakan pembangunan beberapa dam/waduk guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan dengan pembukaan lahan sawah baru. Di wilayah Nusa Penida dikembangkan system jaringan irigasi perpipaan dengan memanfaatkan mata air dan sumber bor dan sistem irigasi hanya diperuntukan bagi tanaman lahan kering dengan penyiraman tanpa penggenangan.

#### **E. Politik, Hukum dan Pemerintahan**

1. DPRD sebagai lembaga politik memegang peranan penting di masa datang dalam rangka menegakkan sistem kehidupan demokrasi dan adanya kontruksi bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD berkedudukan setara dan bersifat kemitraan memberikan peluang bagi DPRD untuk



membuat kebijakan daerah yang sifatnya saling dukung dan bukan merupakan lawan karena masing-masing telah memiliki fungsi tersendiri. Proyeksi keberhasilan terkait dengan adanya partai politik yang majemuk serta perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan lembaga DPRD yang lebih mengedepankan fungsi dan peran parpol dan atau DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan memberikan jaminan adanya suatu control terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

2. Tertibnya pelaksanaan peraturan desa pakraman, sehingga memudahkan pelaksanaan pembinaan dan adanya pemberian hak bagi daerah kabupaten dalam penegakan hukum kelautan, sehingga masalah-masalah pelanggaran pelestarian, pemanfaatan dan ekplorasi potensi kelautan padat tertangani segera oleh Kabupaten.
3. Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memungkinkan bagi upaya revitalisasi kelembagaan di tingkat kecamatan termasuk peluang adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada camat, kondisi Geografis Kabupaten Klungkung yang mempunyai wilayah kepulauan berpeluang dilakukannya pemekaran kecamatan untuk lebih memudahkan pemberian pelayanan public, serta adanya potensi dan daya tarik industri (Agroindustri dan industri pariwisata) serta Isju pertumbuhan pembangunan fisik oleh masyarakat Klungkung, memberikan peluang bagi intensnya pelayanan perijinan sistem satu atap/satu pintu.
4. Meningkatnya animo masyarakat untuk berkomunikasi, berkonsultasi kepada Kepala Daerah dan pimpinan daerah seiring diterapkannya paradigma baru penyelenggaraan prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sejalan dengan konsep menyatunya pemimpin-pemimpin daerah dengan rakyatnya (***Manunggaling Kaula lan Gusti***). Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan melalui pengaturan dan pemanfaatan sumber daya. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sehingga diperoleh birokrasi yang



handal dan professional, efisien produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehubungan dengan daerah akan menjadi pusat pembangunan dan ekonomi, maka fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya akan semakin kompleks dan meningkat seiring dengan derasnya arus informasi diberbagai bidang kegiatan pembangunan. Agar terciptanya keterpaduan dan sinergi pembangunan yang lebih partisipatif maka teknologi informasi dan telekomunikasi disetiap instansi pemerintah mempunyai peran strategis yang sangat diperlukan untuk dapat mengakses keterhubungan informasi anatar pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya Untuk mewujudkan good governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi disetiap instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, akurat dan aman. Apalagi dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Klungkung yang terdapat daerah kepulauan yang luasnya 2/3 dari daerah Klungkung daratan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi dan sangat penting.

#### **F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**

Proyeksi peluang kedepan terkait dengan Lintibmas antara lain, adanya peluang Reorganisasi dan Revitalisasi antara Kantor Lintibmas dengan kantor Kesbang & PM serta Sat.Pol PP maka akan diperoleh kejelasan Tupoksi masing-masing untuk menangani masalah ketentraman, ketertiban umum, keikutsertaan menjaga keamanan wilayah, keikutsertaan menjaga kesatuan dan persatuan, kerukunan serta keutuhan bangsa. Adanya kebutuhan akan rasa ketentraman dikalangan masyarakat merupakan peluang bagi kemudahan dalam rangka pembinaan ketentraman di masa datang melalui upaya pengendalian diri masing-masing individu.



## **G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

1. Terbitnya Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab VII yang memuat substansi perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan peluang bagi daerah untuk memantapkan produk-produk rencana baik rencana tata ruang maupun program/kegiatan termasuk pengendaliannya. Proyeksi Keberhasilan dimasa datang di bidang Perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang bahwa jumlah dan mutu dokumen perencanaan akan semakin baik dengan efektifitas/sasaran perencanaan semakin tepat, apabila dibarengi dengan upaya peningkatan SDM perencana terutama di bidang Planologi dengan penunjukan jabatan fungsional perencana yang independen.
2. Pada akhir periode rencana, diperkirakan adanya ancaman pencemaran kimia udara semakin tinggi dengan terbangunnya jalur jalan arteri Tohpati – Kusamba. Ancaman pencemaran debu akan berkurang apabila kawasan Galian C telah dialihfungsikan pada akhir masa rencana. Dengan demikian alihfungsi lahan Kawasan Galian C memberikan peluang bagi pengendalian ancaman debu pada akhir masa perencanaan. Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat adanya ancaman popusi udara antara lain diperkirakan meningkatnya penderita saluran pernafasan terutama pada lingkungan masyarakat sepanjang corridor arteri Tohpati-Kusamba. Adanya teknologi bidang pemantauan pencemaran lingkungan, dapat memberikan keberhasilan dalam upaya pengendalian dampak pencemaran lingkungan.
3. Semakin bertambahnya daerah terbangun merupakan ancaman terhadap alih fungsi lahan sawah. Bila pengendalian dan pengawasan memanfaatkan ruang lebih intens dilakukan, maka akan memberikan peluang bagi terkendalinya laju pertumbuhan alih fungsi lahan sawah di masa mendatang. Hal yang sama juga berlaku bagi penggalian bahan golongan C di Gunaksa/Tangkas dan di Nusa Penida. Permasalahan penambangan liar di Klungkung daratan dan kepulauan diperkirakan tetap muncul di masa datang tanpa disertai penasihatan dan kesadaran masyarakat. Penelitian kelayakan, pengaturan dan pengawasan usaha penambangan



dapat memberikan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan alam abiotik. Hal yang sama juga berlaku untuk persoalan hutan, lahan kritis, ketersediaan airdalam mutu dan jumlah, abrasi pantai, persampahan maupun persoalan suaka marga satwa yang keberadaannya langka.



## **BAB VI**

# **P E N U T U P**

### **6.1 Ringkasan Capaian Kinerja**

Berdasarkan atas hasil evaluasi Program RPJMD tahun 2008-2013, dapat diketahui bahwa secara umum seluruh program telah dilaksanakan dengan baik sehingga capaian indikator output dari semua kegiatan telah tercapai dengan baik. Namun jika dilihat dari beberapa indikator makro berdasarkan aspek kinerja daerah yaitu: (1) Aspek kesejahteraan masyarakat; (2) Aspek pelayanan umum; dan (3) Aspek daya saing daerah beberapa indikator kinerja masih berada di bawah rata-rata capaian kinerja provinsi dan beberapa indikator capaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pembangunan lima tahun mendatang antara lain:

#### **1. Aspek Geografis dan Demografis**

Secara geografis wilayah Kabupaten Klungkung luasnya terkecil kedua setelah Kodya Denpasar, dimana dua pertiganya merupakan luas Kepulauan Nusa Penida dengan karakteristik wilayah dengan lahan kering. Luas lahan Kabupaten Klungkung mencapai 31.500 Ha, dimana 27.655 diantaranya merupakan lahan kering. Kondisi seperti ini tentu harus mendapat perhatian yang serius mengingat, struktur pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan masih didominasi oleh sektor pertanian (yaitu 28,33%).

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Klungkung periode 2007 – 2012 mencapai 0,95 % dimana penduduk Klungkung tahun 2012 telah mencapai 186.488 jiwa yang terdiri dari 91.623 jiwa laki-laki dan 94.865 jiwa perempuan. Angkatan kerja tahun 2012 mencapai 100.907 orang yang terdiri dari 98.834 orang yang bekerja dan 2.073 orang sedang mencari pekerjaan. Sebagian besar penduduk angkatan kerja ini bekerja di sektor pertanian, disusul sektor hotel dan restoran, kemudian sektor industri pengolahan.

Berdasarkan atas kondisi tersebut, kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian yang dapat



mendukung sektor industri pengolahan dan pariwisata. Dengan demikian diharapkan PDRB Kabupaten Klungkung meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang dengan semakin banyak diserapnya tenaga kerja sektor pertanian, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.

## **2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu parameter pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya peningkatam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dalam rangka mengembangkan kemampuan amsyarakat dalam kehidupan sosial, seni, olahraga dan teknologi maupun di bidang lainnya, serta mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhannya. Aspek kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian adalah: (a) peningkatan produktivitas; (b) pemerataan, (c) keberlanjutan, dan (d) pemberdayaan.

### **A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.**

Berdasarkan atas capaian kinerja pemerintahan periode 2008-2012, PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga konstan terus tumbuh dengan baik dimana tahun 2012 pertumbuhan mencapai 6,03 % namum masih berada di bawah pertumbuhan Provinsi Bali yaitu 6,65%. Berdasarkan ats PDRB per Kapita, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung yang relatif sedikit memberikan keuntungan sehingga PDRB per Kapita capaian tahun 2012 relatif baik yaitu mencapai Rp 8.382.332,- lebih baik dari rata-rata Provinsi Bali yaitu Rp. 8.106.537,- . Dilihat dari lahu pertumbuhan sektor pembentuk PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertanian mengalami perlambatan, dimana tahun 2010 tumbuh 2,12% sedangkan tahun 2012 tumbuh hanya 1,74%. Kondisi seperti ini harus disiasati melalui upaya upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian ditengah-tengah ancaman alih fungsi lahan yang semakin tidak mampu terbendung akibat laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan sektor listri, gas, air, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komuniaksi mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

Berdasarkan atas pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2012 sebesar Rp. 695.087,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp.



346.795,- dan non makanan sebesar Rp. 348.292,-. Pengeluaran penduduk untuk non makanan lebih tinggi dari makanann menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Klungkung rata-rata sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.

Pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat kabupaten Klungkung dapat diukur dari rasio gini, dimana tahun 2012 gini rasio Kabupaten Klungkung sebesar 0,3473, dimana angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yaitu 0,4017. Namun gini rasio melebihi angka 0,3 termasuk katagori ketimpangan pendapatan sedang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerinthan lima tahun mendatang agar mampu mencapai pemerataan pendapatan masyarakat dan emncegah terjadinya ketimpangan pendapatan yang terlalu lebar antara penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi, sehingga program prioritas lima tahun mendatang diarahkan pada pemerataan infrastruktur wilayah dan pemerataan pembangunan hingga sampai pelosok.

## B. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial suatu masyarakat diukur dari status sosial masyarakat yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan. Salah satu indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya IPM (indeks Pembangunan Manusia). Berikut ini disajikan IPM dan komponennya tahun 2012.

**Tabel 6.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012**

Kabupaten / Kota		AHH (e0)	AMH	RLS	PPP (Rp 000)	IPM
1.	Jembrana	71.95	91.36	7.86	637.96	73.62
2.	Tabanan	74.55	90.86	8.39	640.54	75.55
3.	Badung	71.91	93.01	9.47	644.94	75.69
4.	Gianyar	72.22	88.79	8.90	644.69	74.49
5.	Klungkung	69.20	84.15	7.43	658.53	71.76
6.	Bangli	71.81	85.83	6.68	642.64	71.80
7.	Karangasem	68.00	76.03	5.88	654.46	67.83
8.	Buleleng	69.53	89.94	7.54	640.64	71.93
9.	Denpasar	73.12	97.52	10.94	649.48	78.80
<b>BALI :</b>						
<b>2012</b>		<b>70.84</b>	<b>90.17</b>	<b>8.57</b>	<b>640.86</b>	<b>73.49</b>





Kabupaten / Kota	AHH (e0)	AMH	RLS	PPP (Rp 000)	IPM
2011	70.78	89.17	8.35	637.86	72.84
2010	70.72	88.40	8.21	634.67	72.28
2009	70.67	87.22	7.83	632.15	71.52
2008	70.61	86.94	7.81	626.63	70.98

Sumber: Bali Dalam Angka 2013

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup

AMH = Angka Melek Huruf

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

PPP = Paritas Daya Beli

Berdasarkan atas tabel di atas dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2008 – 2013 menunjukkan belum optimal terdapat capaian kesejahteraan masyarakat Klungkung dimana nilai IPM hanya sebesar 71,76 lebih tinggi sedikit dari Kabupaten Karangasem atau urutan ke dua dari bawah. Komponen IPM ini dibentuk dari Angka Harapan Hidup (AHH), dimana tahun 2012 hanya mencapai 69,20 yaitu lebih tinggi dari Kabupaten Karangasem dan menempati urutan kedua dari bawah. Angka AHH yang rendah ini dipicu oleh angka kematian bayi pada tahun 2011 sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup (27 kematian dari 2.942 kelahiran hidup) dan angka kematian balita yang menggambarkan kejadian fase antara kelahiran sampai sebelum umur 5 tahun pada tahun 2011 sebesar 10,2 per 1000 kelahiran hidup (sebanyak 30 Balita).

Beberapa indikator lainnya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan periode lima tahun mendatang di seperti: penyakit menular, kejadian bayi lahir dengan berat badan rendah, kecamatan bebas rawan gizi, cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (capaian Klungkung tahun 2011 paling rendah di Bali yaitu 92,54), cakupan kunjungan neonatus, imunisasi dan persentas ekelurahan UCI, serta indikator lainnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan pada profesi, tenaga kesehatan Kabupaten Klungkung didistribusikan menurut urutan kerja sebagai berikut : puskesmas sebanyak 50% rumah sakit (pemerintah dan swasta) sebanyak 44,30% dan Dinas Kesehatan 5,22%. Ratio tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2010 masih jauh dari target yang diharapkan. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2012, jumlah dokter dengan penduduk Indonesia tidak sebanding sehingga bisa dikatakan hal ini paling buruk se-ASEAN (*Association of South East Asia Nations*). Di Indonesia 3



dokter untuk 10.000 penduduk, sementara di Malaysia 9 dokter untuk 10.000 penduduk

Angka melek huruf di Kabupaten Klungkung tahun 2012 mencapai 84,15 dimana angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Bali yaitu sebesar 90,17. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Klungkung program keaksaraan masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh penduduk melek akan huruf. Kondisi ini menjadi tantangan lima tahun mendatang. Tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Klungkung baru mencapai angka 7,43 tahun. Capaian ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 8,57 tahun. Seiring dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan bahkan kini menjadi wajib belajar 12 tahun, kondisi seperti ini diperlukan kerja keras di semua sektor terkait sehingga pendidikan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu berbagai program pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah perlu lebih diperhatikan terutama wilayah perdesaan yang sangat minim dengan sarana dan prasarana pendidikan.

### **3. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum yang perlu diperhatikan di Kabupaten Klungkung lima tahun mendatang adalah pelayanan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, pelayanan dasar kesehatan, sanitasi lingkungan, pelayanan air bersih, jaringan irigasi, tempat ibadah, perumahan layak huni, ruang terbuka hijau, angkutan umum. Sedangkan pelayanan penunjang yang perlu diperhatikan seperti kemudahan investasi, pelayanan keuangan seperti lembaga keuangan mikro, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

Pelayanan pemerintahan umum selama ini sudah berlangsung dengan baik dimana jumlah kecamatan ada 4 yang terdiri dari Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Sedangkan jumlah desa/kelurahan mencapai 59 buah dengan jumlah dusun mencapai 244 buah. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat Pemkab Klungkung tahun 2012 memiliki 5.596 PNS dimana 38,9% diantaranya sudah berpendidikan S1 dan 1,14% berpendidikan S2.

Pelayanan terdapat pendidikan dasar setingkat SD atau sederajat juga sudah cukup baik dilihat dari rasio murid dengan guru, dimana tahun 2012 rasionya sudah cukup baik yaitu 1: 11,6. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012**

Kabupaten/ Kota	Sekolah				Murid			Guru
	Negeri	Swasta	Madrasah	Jumlah	Laki-laki	Prp.	Jumlah	
1. Jembrana	181	3	10	194	15 766	14 593	30 359	1 520
2. Tabanan	323	5	2	330	20 786	19 034	39 820	3 548
3. Badung	248	19	2	269	31 977	29 101	61 078	3 526
4. Gianyar	280	6	1	287	25 034	23 639	48 673	3 136
5. Klungkung	138	0	2	140	9 729	8 973	18 702	1 610
6. Bangli	162	0	0	162	12 190	11 445	23 635	1 483
7. Karangasem	355	3	6	364	25 019	23 295	48 314	3 978
8. Buleleng	476	4	21	501	43 681	40 748	84 429	4 657
9. Denpasar	168	44	7	219	41 466	38 358	79 824	3 956
Jumlah : 2011/2012	2 331	84	51	2 466	225 648	209 186	434 834	27 414

Sumber : Bali Dalam Angka 2013

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah murid SD atau yang sederajat di Kabupaten mencapai 18.702 orang yang diasuh oleh 1.610 orang guru atau satu (1) orang guru mengasuh anak sebanyak 11,6 orang (rasio 1: 11,6), rasio ini lebih baik dari Kabupaten Gianyar yang mencapai 1: 15,5. Berdasarkan atas kondisi tersebut, maka berbagai upaya peningkatan profesionalisme guru perlu terus diupayakan agar program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun dapat dituntaskan hingga tahun 2018 mendatang.

Bidang pelayanan pendidikan menengah, jumlah murid SMU tahun 2012 mencapai 5.153 orang dan jumlah guru 510 orang sehingga rasionya 1:10,10. Angka ini cukup rasional sehingga beban guru mengajar tidak berlebihan. Namun mengingat capaian IPM masih rendah maka upaya peningkatan mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung didukung dengan sarana kesehatan beruparumah sakit umum ada sebanyak 3unit, puskesmas 9 unit, puskesmas pembantu 54 unit, dan puskesmas keliling 9 unit, balai pengobatan 7 unit, optikal 4 unit, apotik 13 buah, dan toko obat berijin sebanyak 9 buah.



Dalam pelayanan medis didukung oleh praktek tenaga kesehatan seperti : praktek dokter umum 57 orang, praktek dokter spesialis 20 orang , praktek dokter gigi 7 orang, bidanpraktek 55, poskesdes 59, dan posyandu sebanyak 289. Dengan begitu banyaknya tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Klungkung, diharapkan pelayanan di bidang kesehatan akan semakin baik.

Capaian derajat kesehatan keluarga dilihat tahapan Keluarga Sejahtera tahun 2012 pra KS berjumlah 6.087 keluarga, KS I 3.885 keluarga, KS II 9.140 keluarga, KS III 27.510 keluarga dan KS III+ 145 keluarga. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah pra KS, KS II dan KS III+ yang mengalami peningkatan, sedangkan KS I, KS III mengalami penurunan.

Di bidang pelayanan infrastruktur wilayah, sampai tahun 2012, di Kabupaten Klungkung masih terdapat jalan rusak 66.330 Km. Panjang jalan menurut status jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung tahun 2012 mencapai 492.920 Km, dengan permukaan aspal sepanjang 456.427 Km, krikil sepanjang 1.700 Km, dan jalan tanah sepanjang 34.793 Km.

Capaian di bidang pelayanan umum tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sudah mencapai di atas 90% untuk rumah dengan kategori lantai bukan tanah dan atap yang layak . Berdasarkan hasil Susenas, terjadi penurunan persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2012 di perkotaan terjadi penurunan 6,75% dan perdesaan terjadi penurunan 5,53% rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> . Hal ini disebabkan oleh pembangunan perumahan yang merata baik di desa maupun kota, jumlah anggota rumah tangga yang ideal menempati bangunan tempat tinggal.

**Tabel 6.3**  
**Statistik Perumahan Klungkung**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2010</b>
Rumah Tangga dengan luas lantai per kapita, <10 m <sup>2</sup> (%)			
Perkotaan	20,65	13,90	16,60
Perdesaan	21,11	15,58	18,18
Rumah Tangga menurut kualiti-tas perumahan (%)			
Lantai bukan tanah	97,43	97,49	95,92
Atap layak	98,99	98,99	98,95
Dinding permanen	96,54	98,13	98,73

Sumber: Statistik Daerah Klungkung 2013



Di bidang pelayanan akses terhadap air bersih, persentase rumah tangga pengguna air minum bersih tahun 2012 sebesar 81,64% dan pengguna air kemasan, isi ulang dan ledeng pada sebesar 63,44%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kondisi kesehatan penduduk juga semakin membaik, dimana akses akan air bersih sdah semakin mudah. Sedangkan pelayanan terhadap energi, tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pelanggan listrik sebesar 7,96% dari tahun sebelumnya. Energi listrik yang terpakai meningkat sebesar 14,63%. Peningkatan ini diakibatkan oleh peningkatan populasi penduduk, aktivitas masyarakat, pemakaian peralatan elektronik, dan peningkatan ektivitas ekonomi yang dila-kukan oleh rumah tangga. Hal ini sudah menunjukan bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat akibat peningkatan aktivitas ekonomi yang membutuhkan dukungan energi listrik.

Pelayanan umum di bidang industri, sampai tahun 2012 di Kabupaten Klungkung terdapat Industri Besar Sedang (IBS) yang tersebar di 3 kecamatan dimana di Kecamatan Nusa Penida tidak terdapat IBS. Kecamatan Dawan terdapat 9 IBS, Klungkung 5 IBS dan Banjarangkan 3 IBS dengan menyerap tenaga kerja seluruhnya 616 orang. Sedangkan pada tahun 2011 hanya menyerap 589 orang. Dari seluruh IBS, dimana 70,59% dari total IBS adalah industri kain tenun endek dan songket.

Di Kabupaten Klungkung juga terdapat industri kecil 399 buah dan 5.005 buah induistri rumah tangga masing - masing menyerap tenaga kerja 4.181 orang dan 11.128 orang. Dengan jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut menyebabkan sektor industri menjadi tumpuan perekonomian Klungkung karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Berdasarkan peningkatan industri yang berkembang maka prioritas pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong peningkatan daya saing industri dan daya saing produk yang dihasilkan agar tetap mampu memberikan nilai tambah. Industri rumah tangga dan IKM perlu terus didorong agar tumbuh menjadi industri kreatif yang tangguh dan berdaya saing.

Di bidang pelayanan pariwisata Kabupaten Klungkung memiliki daya tarik pariwisata tersendiri. Kecamatan Nusa Penida yang merupakan kecamatan yang terpisah dari pulau Bali merupakan destinasi favorit di Kabupaten Klungkung yang menyediakan keindahan alam laut dan wisata olah-raga lautnya. Selain itu wisata kertagosa, goa lawah dan *rafting* di desa bakas merupakan obyek wisata yang cukup banyak dikunjungi. Kunjungan wisatawan ke objek wisata tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,07 persen.



Sebagai destinasi wisata, fasilitas akomodasi tentu sangat diperlukan guna mendukung pariwisata. Pada tahun 2012 Kabupaten Klungkung memiliki sebanyak 55 hotel, yang terdiri dari 4 hotel berbintang dan 51 hotel non berbintang. Terdapat 558 kamar dengan 738 tempat tidur. Jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2012 tercatat 245.199 orang atau naik 1,07 % dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 242.612 orang. Sementara jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gianyar sudah mencapai 1.680.105 orang. Untuk itu berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Klungkung perlu dipetakan dan dipromosikan secara terus menerus sehingga kunjungan wisatawan dapat ditingkatkan. Sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung dilihat dari sisi sektor pembentuk PDRB memberikan sumbangan yang signifikan dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai pendukung pariwisata merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian.

Berdasarkan data di atas maka arah peningkatan pelayanan umum sektor pariwisata yang didukung sektor perdagangan, hotel dan restoran perlu terus ditingkatkan terutama pengembangan destinasi pariwisata, promosi pariwisata dan kelembagaannya.

#### **4. Aspek Daya Saing**

Aspek daya saing yang perlu diperhatikan adalah kemampuan ekonomi daerah, produktivitas daerah dan iklim investasi dan peningkatan SDM. Capaian program pembangunan periode 2008 – 2013 telah memberikan peningkatan terhadap daya saing daerah dilihat dari peningkatan PDRB per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Tahun 2012 terjadi peningkatan rata - rata pengeluaran penduduk Klungkung sebesar 3,82%. Pada tahun 2012 rata - rata pengeluaran penduduk Klungkung sebesar Rp 695.087 dan tahun 2011 sebesar Rp 669.522. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan harga ko-moditi baik makanan dan non makanan atau kenaikan konsumsi barang dan jasa.

Jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran maka rata - rata pengeluaran makanan sebesar Rp 346.795 atau terjadi peningkatan sebesar 14,6% dibandingkan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman terutama makanan jadi dan beras. Namun pengeluaran non



makanan menurun pada ta-hun 2012 sebesar 5% dibandingkan tahun 2011. Secara rata - rata pengeluaran non makanan mungkin mengalami penurunan dapat disebabkan oleh berkurangnya konsumsi non makanan masyarakat seperti pembelian pakaian, transportasi, perbaikan rumah dan lain sebagainya. Juga dapat disebabkan oleh konsekuensi dari peningkatan pengeluaran makanan yang akan berpengaruh terhadap pengeluaran non makanan.

Dilihat dari sisi produktivitas daerah yang dihitung berdasarkan rasio PDRB sektor tertentu dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut. Dari hasil perhitungan diketahui produktivitas sektor industri pengolahan paling tinggi disusul sektor pertanian dan sektor Pertambangan, Angkutan, Bangunan dan Keuangan.

Dari sisi peningkatan SDM, capaian kinerja peningkatan daya saing SDM dilihat dari angka angkatan kerja yang semakin meningkat, namun mengingat pertumbuhan penduduk usia angkatan kerja terus meningkat menyebabkan angka pengangguran terbuka yang terus juga meningkat hingga mencapai 2.073 orang. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2011 sebesar 1,78% naik menjadi 2,05% di tahun 2012.

Kondisi seperti ini merupakan tantangan di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan daya saing SDM calon tenaga kerja guna penurunan tingkat pengangguran terbuka. Berbagai program peningkatan kualitas calon tenaga kerja perlu dipersiapkan dan berbagai bidang usaha yang memberikan penyerapan tenaga kerja perlu diperhatikan misalnya dengan memberikan insentif kemudahan investasi dan lain sebagainya.

## 6.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan atas pertimbangan capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome yang telah dibahas sebelumnya, beberapa indikator kinerja makro perlu ditingkatkan secara signifikan, mengingat capaian kinerja pemerintahan daerah periode 2008 – 2013 belum optimal sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung dapat sejajar dengan daerah lain yang lebih maju. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang seperti laju aspek geografis wilayah dengan lebih banyak lahan kering, aspek demografi dimana laju pertumbuhan penduduk terus bertambah, aspek kesejahteraan masyarakat dimana masih adanya



ketimpangan antar sektor pembentuk PDRB, pendapatan per kapita masih rendah, dan laju pertumbuhan PDRB masih belum merata, PAD masih rendah, aspek kesejahteraan sosial dimana capaian IPM masih rendah, aspek daya saing dimana iklim investasi dan kunjungan pariwisata masih rendah dan produktivitas daerah masih perlu ditingkatkan.

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, maka beberapa hal yang dapat menjadi prioritas pembangunan lima tahun mendatang adalah:

1. Optimalisasi sektor pembentuk PAD dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan PAD sehingga pemerintah memiliki pembiayaan pembangunan yang cukup.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan program sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
3. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata melalui program pengembangan destinasi, promosi dan peningkatan kelembagaan pengelolaan obyek wisata.
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya dengan indikator membaiknya angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli.
5. Peningkatan pemerataan pembangunan pelayanan umum seperti infrastruktur wilayah, irigasi, sanitasi lingkungan, sosial budaya, seni dan olahraga yang mampu mendorong berkembangnya iklim usaha, iklim investasi yang kondusif, dan mampu mengurangi angka kemiskinan.
6. Pengembangan UKM dan Usaha Mikro Kecil lainnya agar mampu berdaya saing dengan pengembangan produk unggulan daerah.
7. Peningkatan pemanfaatan TTG dalam semua aspek sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi daerah.
8. Peningkatan SDM aparatur dan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berpihak pada pelayanan publik yang bermutu.